

**ANALISIS WACANA TERKAIT PEMBERITAAN  
HARY TANOESOEDIBYO DALAM MEDIA ONLINE  
SINDONEWS.COM**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I  
Pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika**

**Oleh:**

**DHIAJENG AYU UTRI AGUSTIN**  
**L100217279**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS WACANA TERKAIT PEMBERITAAN HARY  
TANOESOEDIBYO DALAM MEDIA ONLINE SINDONEWS.COM**

**PUBLIKASI ILMIAH**

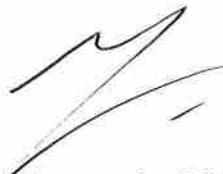
oleh:

**DHIAJENG AYU UTRI AGUSTIN**

**L100217279**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Yudha Wirawanda, S.Ikom., M.A**

**NIDN. 0624078904**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS WACANA TERKAIT PEMBERITAAN HARY  
TANOESOEDIBYO DALAM MEDIA ONLINE SINDONEWS.COM**

Oleh:  
**DHIAJENG AYU UTRI AGUSTIN**  
L100217279

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Komunikasi dan Informatika  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 6 Juli 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

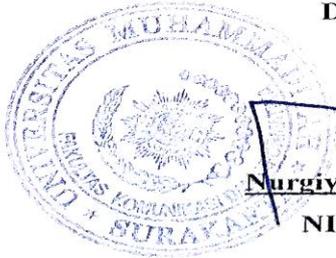
**Dewan Penguji:**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. <b>Yudha Wirawanda, S.I.Kom., M.A</b><br/>(Ketua Dewan Penguji)</p> <p>2. <b>Dr. Fajar Junaedi, S.Sos., M.A</b><br/>(Anggota I Dewan Penguji)</p> <p>3. <b>Nur Latifah Umi Satiti, S.Sos., M.A</b><br/>(Anggota II Dewan Penguji)</p> | <p>(.....)</p> <p>(.....)</p> <p>(.....)</p> |
|---|--|

**Dekan**



**Nurgiyatna, Ph.D**  
NIK. 881



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 03 Agustus 2022  
Penulis,



**Dhiajeng Ayu Utri Agustin**  
**L100217279**

# ANALISIS WACANA TERKAIT PEMBERITAAN HARY TANOESOEDIBYO DALAM MEDIA ONLINE SINDONEWS.COM

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana di balik pemberitaan kasus SMS ancaman Hary Tanoesoedibyo (HT) pada media online *Sindonews.com*. Metode penelitian menggunakan analisis wacana berdasarkan teori dari Norman Fairclough, dengan membagi analisis ke dalam tiga dimensi, yaitu: analisis teks (dimensi mikro), analisis praktik wacana (dimensi meso), dan analisis praktik sosial budaya (dimensi makro). Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan sampel penelitian sebanyak 15 berita yang terbit pada 23 Juni - 3 Juli 2017 di portal *Sindonews.com*. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi. Peneliti mendokumentasikan berita dan gambar dalam portal berita online *Sindonews.com* pada tanggal 23 Juni - 3 Juli 2017. Data-data tersebut tidak hanya peneliti kumpulkan tetapi juga disesuaikan dengan metodologi analisis wacana yang digunakan. Dari hasil analisis, terdapat tiga kategori wacana dalam pemberitaan tersebut, yaitu: konstruksi wacana kasus SMS ancaman HT, strategi konstruksi wacana kasus sms ancaman HT, dan praktik sosiokultural berita kasus SMS ancaman HT.

**Kata Kunci:** wacana, media, analisis, Fairclough

## Abstract

This study aims to find the discourse behind reporting the threat case of Hary Tanoesoedibyo (HT) SMS on the online media *Sindonews.com*. The research method uses discourse analysis based on the theory of Norman Fairclough, by dividing the analysis into three dimensions, namely: text analysis (micro dimension), discourse practice analysis (meso dimension), and socio-cultural practice analysis (macro dimension). The sampling technique used is purposive sampling with 15 research samples published on June 23 - July 3, 2017, on the *Sindonews.com* portal. The data collection technique used is documentation. Researchers documented news and images in the online news portal *Sindonews.com* on June 23 - July 3, 2017. These data were not only collected but also adjusted to the discourse analysis method that used in this study. The results of the analysis showed there are three categories of discourse in the news, namely: construction of discourse on HT threat SMS cases, discourse construction strategy of HT threat SMS cases, and practice of HT threat news discourse.

**Keywords:** discourse, media, analysis, Fairclough

## 1. PENDAHULUAN

Wacana merupakan proses pengembangan dari komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Wacana berita bukan hanya disajikan sebagai berita, tetapi dapat dijasikan sebagai sarana pertarungan kekuasaan dari berbagai pihak yang ingin membatasi pembentukan opini publik atas suatu

masalah pada suatu ideologi tertentu (Desiana, 2013). Melalui pendekatan wacana pesan-pesan komunikasi, seperti kata-kata, tulisan, gambar, dan lain-lain, eksistensinya ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya, misalnya konteks peristiwa yang berkenaan dengannya, situasi masyarakat luas yang melatarbelakangi keberadaannya dan nilai-nilai. Kesemuanya itu dapat berupa nilai-nilai ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan, dan lain-lain.

Adanya kepentingan yang bermain dalam wacana berita di media, telah membuat kualitas pemberitaan menjadi sangat bergantung pada kebijakan institusi. Terdapat perubahan dalam tugas media yang seharusnya dapat menyampaikan pemberitaan secara netral dan apa adanya, telah berubah menjadi kepentingan dari perusahaan media tersebut. Suatu peristiwa dapat diberitakan dengan berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Media dapat menonjolkan A pada suatu peristiwa tertentu sedangkan media yang lain akan menonjolkan B pada peristiwa yang sama (Cheng, 2016).

Konten media akan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang berada di luar media. Bagaimana isi media akan ditentukan oleh faktor pemilik media, iklan, modal dan juga regulasi pemerintah. Penentuan dalam hal ini bisa meliputi peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa diberitakan, atau ke arahmana pemberitaan tersebut akan diarahkan. Kekuatan-kekuatan ekonomi yang dominan dalam menguasai media massa akan menentukan pola dan jenis dari pemberitaan (Sudibyo, 2000).

Terjadinya revolusi teknologi penyiaran dan informasi, korporasi-korporasi media terbentuk dan menjadi besar dengan cara kepemilikan saham, penggabungan *join venture*, pembentukan kerjasama, atau pendirian kertel komunikasi raksasa yang memiliki puluhan bahkan ratusan media (Tyas, 2010). Fenomena ini bukan hanya semata-mata fenomena bisnis, melainkan fenomena ekonomi politik yang melibatkan kekuasaan. Kepemilikan media bukan hanya berurusan pada persoalan produk, tetapi berkaitan dengan lanskap sosial, citraan berita, pesan dan kata-kata dikontrol dan disosialisasikan kepada masyarakat. Contoh korporasi media di Indonesia saat ini yaitu PT. MNC Grup, PT. Trans Corp, Jawa Post Grup, dan lain-lain.

Saat ini, dua belas kelompok media besar mengendalikan hampir semua kanal media di Indonesia, termasuk di dalamnya penyiaran, media cetak dan media *online*. Mereka adalah MNC Group, Kelompok Kompas Gramedia, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Grup Jawa Pos, Mahaka Media, CT Group, Berita Satu Media Holdings, Grup Media, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media. Grup MNC memiliki tiga kanal televisi yang merupakan jumlah terbanyak yang dimiliki oleh grup media, serta 20 jaringan televisi lokal dan 22 jaringan radio di bawah anak perusahaan mereka, Sindo Radio. Grup Jawa Pos memiliki 171 perusahaan media cetak, termasuk di dalamnya Radar Grup. KOMPAS, surat kabar paling berpengaruh di Indonesia, telah mengekspansi jaringannya dengan mendirikan penyedia konten yaitu KompasTV, di samping 12 penyiaran radio di bawah anak perusahaan mereka Radio Sonora, dan 89 perusahaan media cetak lainnya. Visi Media Asia telah berkembang menjadi kelompok media yang kuat dengan dua saluran televisi teresterial (ANTV dan tvOne) serta media *online* yang berkembang dengan pesat *vivanews.com*. Sebuah perusahaan media di bawah Grup Lippo yakni Berita Satu Media Holding, telah mendirikan *Internet Protocol Television* (IPTV) BeritaSatuTV, kanal media online *beritasatu.com* dan juga memiliki sejumlah surat kabar dan majalah (CIPG, 2013).

PT. MNC Group merupakan perusahaan media di Indonesia yang memiliki bisnis di bidang *broadcasting media*. PT. MNC Group dipimpin oleh Hary Tanoesudibjo sebagai Komisaris Utama, dengan saham yang dimiliki sebesar 27,47 persen. Salah satu media yang berada di bawah naungan PT. MNC Grup yaitu *Koran Sindo*. Selain media cetak terdapat juga portal berita online yaitu *Sindonews.com*, yang merupakan edisi online dari *Koran Sindo*. Selain menampilkan artikel-artikel dari *Koran Sindo*, *Sindonews.com* juga memberikan akses ke konten daerah yang diterbitkan dalam *Koran Sindo* edisi lokal (*mnc.co.id*).

Hary Tanoesoedibjo menjadi tokoh elit politik yang menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan karena Hary Tanoesoedibjo memiliki perusahaan media terbesar di Indonesia (Afrianto, 2017). Adanya jaringan media yang

besar, Hary Tanoesoedibjo mampu mengontrol pikiran publik dengan skala yang sama besarnya dengan jaringan media yang dimilikinya.

Peneliti memilih wacana Hary Tanoesoedibjo yang berada di dalam portal berita online *Sindonews.com*. Media online dipilih karena peneliti beranggapan bahwa media online dapat diakses kapanpun dan di manapun, serta dapat disebarluaskan dalam dunia nyata maupun dunia maya (media online) (Anggoro dkk, 2017).

Media online akan mengalami dilema, ketika pemilik modal terjerat kasus atau mengalami konflik. Media online juga dihadapkan pada bagaimana mereka dalam melakukan pemberitaan terkait kasus tersebut. Seperti kasus hukum yang menimpa Hary Tanoesudibjo yang merupakan pemilik dari *Sindonews.com*. Hary Tanoesoedibjo selaku CEO MNC Group sekaligus ketua DPP Partai Perindo terjerat kasus SMS ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Tidak terima dengan SMS tersebut, Yulianto melaporkan kepada Polda Metro Jaya. Polisi merespon laporan tersebut, pada tanggal 23 Juni Hary Tanoesudibjo ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Dijerat dengan pasal 29 UU Nomor 11/2008 tentang ITE. Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp.750 juta.

Sebagai CEO dari MNC Group yang merupakan perusahaan yang menaungi belasan media di Indonesia, berita penetapannya sebagai tersangka sudah pasti dimuat dalam media-media miliknya, tidak terkecuali juga di portal berita online *Sindonews.com*. Terhitung sejak 16 Juni berita tentang SMS ancaman Hary Tanoesudibjo selalu menghisai laman portal berita online. Pemberitaan yang diberitakan *Sindonews.com* kerap bernada negatif terhadap status tersangka yang diberikan kepada Hary Tanoesudibjo.

Kondisi ini menarik untuk diteliti melalui analisis wacana milik Norman Fairclough. Norman Fairclough mengemukakan bahwa wacana merupakan sebuah praktik sosial dan membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi yaitu *text*, *discourse practice*, dan *sosial practice* (Foucault, 1969). Menurut

Fairclough, analisis wacana pada peristiwa komunikasi merupakan analisis hubungan antara tiga dimensi, yaitu: dimensi mikro (analisis teks), dimensi meso (analisis praktik wacana), dan dimensi makro (analisis praktik sosial budaya) (Khak, 2015). Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan dimensi mikro (analisis teks) yang menitikberatkan perhatian pada teks sebagai peristiwa bahasa, yang dapat berupa tulisan maupun lisan. Kemudian untuk melengkapinya peneliti akan menggunakan dimensi makro (analisis praktik sosial budaya) yang berfokus pada sosial budaya saat komunikasi berlangsung yang akan mempengaruhi teks secara keseluruhan.

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan 15 berita yang terbit pada tanggal 23 Juni 2017 - 3 Juli 2017. Alasan peneliti memilih berita tersebut untuk dijadikan subjek penelitiannya, karena pada tanggal 23 Juni Hary Tanoesoedibjo resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus SMS ancaman. Selain itu, kasus tersebut juga berada pada puncaknya dan melibatkan berbagai kalangan pihak sebagai narasumber yang akan dijadikan bahan pemberitaan.

Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Andi Kaprabowo dengan judul “Analisis Pemberitaan FPI Pasca Kerusuhan di Kendal, Pandeglang, Banten (Studi Kasus Konstruksi Wacana Surat Kabar Harian Koran Sindo Edisi Februari 2011)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi berita tentang FPI pasca kerusuhan di Kendal, Pandeglang, Banten dalam SKH Koran Sindo. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah secara keseluruhan sikap pro Harian Koran Sindo terhadap pembubaran FPI dan menyatakannya sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kerusuhan di Kendal dapat dilihat dari pemilihan narasumber, penulisan struktur kalimat, penjelasan yang dituliskan oleh narasumber dan juga penekanan yang diberikan kepada pembaca. Kesemuanya merupakan gambaran sikap *Koran Sindo*.

Dari skripsi yang penulis jadikan rujukan, terdapat kesamaan yaitu dalam penelitian ilmiah tersebut menggunakan analisis wacana sebagai metode analisisnya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada

model wacana yang dipilih. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan model wacana Teun A Van Dijk sedangkan peneliti saat ini menggunakan model wacana milik Norman Fairclough. Selain itu, perbedaan juga terletak pada jenis media yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam skripsi Andi Kaprabowo menggunakan media cetak sebagai objek penelitian sedangkan peneliti menggunakan media online sebagai objek penelitiannya.

Penelitian yang relevan juga telah dilakukan oleh Nopita Desiana pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Hukum dalam Majalah Tempo Edisi Juli 2012”. Penelitian ini difokuskan pada analisis wacana kritis untuk mengetahui ideologi pembuatan teks yang tercermin dari wacana tersebut. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa dalam pemberitaan kasus hukum majalah *Tempo* edisi Juli 2012 mengandung ideologi hukum keberpihakan terhadap rakyat kecil dan keadilan, dan wacana berita kasus hukum tidak mengandung karakteristik kekuasaan. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nopita Desiana ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penggunaan analisis wacana milik Norman Fairclough sebagai metode analisisnya. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya terletak pada jenis media yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian milik Nopita Desiana menggunakan majalah *Tempo* edisi 2012 sebagai objek penelitiannya sedangkan peneliti menggunakan media online yaitu *Sindonews.com*.

Berdasarkan hasil pemaparan dan penelitian yang relevan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencermati bagaimana wacana pemberitaan Kasus Hukum SMS ancaman yang menimpa Hary Tanoesudibjo dalam portal berita online *Sindonews.com*.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana. Peneliti menggunakan analisis wacana oleh Norman Fairclough. Fairclough menyatakan proses analisis teks ini sebagai mikro level, *discourse practice* sebagai meso level, dan proses analisis praktik sosial cultural sebagai makro level (Fairclough dalam

Setiawan, 2011). Fairclough membagi analisis wacananya dalam tiga dimensi, yaitu: analisis teks (dimensi mikro), analisis praktik wacana (dimensi meso), analisis praktik sosial budaya (dimensi makro) (Khak, 2015). Analisis teks (dimensi mikro) yaitu semua yang mengacu ke wicara, tulisan, grafik, dan kombinasinya atau semua bentuk linguistic teks (khasanah kata, gramatika, *syntax*, struktur metafora, retorika).

Analisis praktik wacana (dimensi meso) yaitu semua bentuk produksi serta konsumsi teks. Pada dimensi ini, terdapat proses menghubungkan produksi serta konsumsi teks atau sudah ada interpretasinya. Fokus analisis ini diarahkan pada cara pengarang teks mengambil wacana dan *genre* yang ada dengan memperhatikan bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan. Analisis yang terakhir yaitu praktik sosial budaya, biasanya tertanam dalam tujuan, jaringan dan praksis budaya sosial yang luas. Pemahaman intertekstual sudah masuk dalam dimensi ini, peristiwa sosial di mana kelihatan bahwa teks dibentuk oleh dan membentuk praksis sosial (Haryatmoko, 2017).

Objek penelitian ini adalah berita-berita yang mengangkat tema tentang kasus hukum yang menimpa Hary Tanoesoedibjo terkait dengan SMS ancaman yang dikirimkan kepada Kepala Jaksa. Untuk media yang dikaji, peneliti memilih portal berita online yaitu *Sindonews.com*. penentuan ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu portal berita *online* ini sangat intens dalam memberitakan kejadian tersebut. Selain itu juga *Sindonews.com* juga memiliki afiliasi terhadap Hary Tanoesoedibjo. Subjek penelitian ini yaitu peneliti akan menggunakan 15 berita beserta gambar yang terbit pada tanggal 23 Juni - 3 Juli 2017. Kategori peneliti memilih berita tersebut untuk dijadikan subjek penelitiannya, yaitu pada kisaran tanggal tersebut, kasus yang menimpa Hari Tanoesudibjo mulai muncul. Selain itu, kasus tersebut juga berada pada puncaknya dan melibatkan berbagai kalangan pihak sebagai narasumber yang akan dijadikan bahan pemberitaan.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi. Peneliti mendokumentasikan berita dan gambar dalam portal berita online *Sindonews.com* pada tanggal 23 Juni - 3 Juli 2017. Data-data tersebut tidak

hanya peneliti kumpulkan tetapi juga disesuaikan dengan metodologi analisis wacana yang digunakan. Untuk teknik sampling peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Sesuai dengan istilahnya, sampel diambil dengan tujuan tertentu. Seorang atau sesuatu ditentukan sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki dan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penelitiannya (Pujileksono, 2015).

Terdapat tiga tahap analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, deskripsi, yaitu menguraikan sisi dan analisis secara deskriptif atas teks. Di sini teks dijelaskan dan dihubungkan dengan aspek lain. *Kedua*, interpretasi, yaitu menafsirkan teks dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan. Di sini, teks tidak dianalisis secara deskriptif, tetapi ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan bagaimana proses produksi teks dibuat. *Ketiga*, eksplanasi, bertujuan untuk mencari penjelasan atas hasil penafsiran kita pada tahap kedua. Penjelasan itu dapat diperoleh dengan mencoba menggabungkan produksi teks dengan kondisi sosial di mana suatu media berada (Eriyanto, 2014). Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data milik Fairclough yang meliputi dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil analisis terhadap pemberitaan kasus SMS ancaman Hary Tanoe tahun 2017 di media *Sindonews.com*, peneliti menemukan kategori-kategori analisis wacana dalam penelitian ini, antara lain: konstruksi wacana kasus SMS ancaman HT, strategi konstruksi wacana kasus SMS ancaman HT, dan praktik sosiokultural berita kasus SMS ancaman HT. Analisis dilakukan berdasarkan model tiga dimensi yang dikembangkan Fairclough. Dengan melihat lapisan-lapisan yang berbeda, memungkinkan penganalisis untuk melihat apa yang tersembunyi serta nilai-nilai ideologis apa yang ada di balik pembuatan teks (Kalla, 2019).

### 3.1. Konstruksi Wacana Kasus SMS Ancaman HT

*Sindonews.com* sebagai media yang memproduksi teks berita mengenai kasus SMS ancaman Hary Tanoe, menggunakan bahasa sebagai *tools* untuk menciptakan wacana sekaligus mengukuhkan ideologi tertentu melalui pemilihan kata (diksi), tata bahasa, kombinasi anak kalimat, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan bahasa, penganalisis bisa menyadari unsur tersembunyi dalam teks (Tian, 2018). Pada analisis dimensi tekstual ini meliputi representasi, relasi, dan identitas.

Representasi pada tahap ini, sebuah teks diambil untuk mewakili suatu wacana yang menyoroti aspek berbeda dari kata-kata dan nilai-nilai deskriptif dan relasional teks (Ullah et al., 2021). Pada tingkat ini difokuskan pada penggunaan kosa kata, tata bahasa, kiasan, makna kata, dan sebagainya. Representasi pada teks dapat dilihat melalui anak kalimat, kombinasi anak kalimat, dan rangkaian antarkalimat (Eriyanto, 2011).

Tabel 1. Anak Kalimat

<b>Edisi</b>	<b>Judul Berita</b>
16 Juni 2017	Kasus SMS Disinyalir untuk Hadang Langkah Politik HT
16 Juni 2017	Jaksa Agung Bermanuver Politik, Layak Di-Reshuffle
16 Juni 2017	Jaksa Agung Harus Mencabut Pernyataannya Soal HT

Representasi dalam anak kalimat merujuk pada bagaimana peristiwa ditampilkan dalam teks melalui bahasa yang dipakai (Eriyanto, 2011). Dalam pemberitaan dengan judul “Kasus SMS Disinyalir untuk Hadang Langkah Politik HT” menunjukkan bahwa tuduhan yang diarahkan kepada HT (Hary Tanoesoedibjo) terkait pesan singkat yang dilayangkan kepada Jaksa Yulianto digambarkan sebagai peristiwa penghadangan langkah HT dalam berpolitik. Pemilihan kata pada anak kalimat sangat berpengaruh dalam membuat metafora yang menunjukkan bahwa peristiwa itu dapat dikategorikan positif atau negatif (Pahlevi, 2018). Pada judul di atas, kata yang dipakai adalah “hadang” yang artinya menghalangi, merintang (biasanya dengan maksud jahat). Dengan kata lain, pihak penuduh (jaksa agung) digambarkan memiliki maksud jahat dengan menuding bahwa SMS

yang dilayangkan HT mengandung unsur ancaman, untuk menghalangi langkahnya menuju pilpres tahun 2019.

Berita ke-2 dengan judul “Jaksa Agung Bermanuver Politik, Layak Di-Reshuffle” menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan jaksa agung membuatnya layak dicopot dari jabatannya. Frasa yang dipilih dalam berita ini adalah “bermanuver politik” yang berarti melakukan gerakan yang cepat dalam bidang politik, yaitu dengan menyatakan HT sebagai tersangka atas kasus pesan singkat yang melibatkan Jaksa Yulianto. Dalam berita tersebut, tindakan ini dipandang sebagai sikap gegabah yang mendahului keputusan Bareskrim Mabes Polri bahwa hingga berita tersebut terbit, HT masih menyandang status sebagai saksi. Tindakan ini juga digambarkan memiliki maksud untuk menguntungkan Partai Nasdem sebagai parpol yang dinaungi oleh jaksa agung.

Sementara itu, kalimat pada judul “Jaksa Agung Harus Mencabut Pernyataannya Soal HT” terdapat unsur pragmatik berupa tindak tutur ilokusi. Menurut Schrffin (dalam Saraswati & Sartini, 2017) tindak tutur ilokusi merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mengatakan dan menginformasikan sesuatu. Pada kalimat tersebut tergambar jelas bahwa ada wacana yang ingin diinformasikan kepada jaksa agung untuk mencabut pernyataannya mengenai kasus SMS HT. Kata “harus” menjadi penegasan sekaligus peringatan keras bahwa apa yang terkandung dalam informasi tersebut wajib dilakukan oleh jaksa agung.

Wacana yang disampaikan yaitu seolah-olah pihak HT berharap agar jaksa agung mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Apabila tidak, maka pihak HT siap memberikan peringatan dalam bentuk lain. Inilah yang oleh Schrffin disebut tindak tutur perlokusi, yaitu tindakan yang memiliki efek atau pengaruh yang kuat. Dalam kalimat tersebut, efek atau pengaruh itu terdapat pada pesan yang mengisyaratkan kepada jaksa agung untuk melakukan suatu hal sesuai yang diwacanakan. Kata “harus” juga merupakan kata kerja modalitas khas yang mengungkapkan kewajiban dan kebutuhan. Halliday & Matthiessen mendefinisikannya sebagai item yang

mengekspresikan sikap penulis atau subjektivitas dari pendapat dan emosinya (Abdelwahab & Abdelwahab, 2021).

Tabel 2. Kombinasi Anak Kalimat

<b>17 Juni 2017</b>	Paragraf 2	Jaksa Agung tidak etis mengambil peran kepolisian dalam menyatakan status tersangka HT.
	Paragraf 3	Pernyataan Jaksa Agung menunjukkan kekuasaan absolut dan konflik interset.
	Paragraf 4	Banyak perkara besar yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah yang diselesaikan Jaksa Agung.
<b>20 Juni 2017</b>	Paragraf 1	Pernyataan Jaksa Agung soal kasus sms HT sarat muatan politis.
	Paragraf 4	Jaksa Agung menyatakan HT sebagai tersangka dalam kasus sms.
	Paragraf 4	Polisi tolak pernyataan Jaksa Agung.

Dari teks berita yang ditulis wartawan pada berita pertama, jaksa agung ditampilkan sebagai sosok yang bertindak gegabah dan memiliki ketidakmampuan dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Alih-alih menyelesaikan pekerjaan rumah yang perkaranya lebih besar, jaksa agung justru terlalu memberikan atensi pada kasus SMS ancaman HT dengan merilis pengumuman bahwa status HT menjadi tersangka. Padahal, tindakannya itu sangat berisiko: *pertama*, mendahului peran polisi dengan mendakwa HT sebagai tersangka atas kasus SMS yang melibatkan anak buahnya; *kedua*, menimbulkan kekuasaan absolut dan konflik interset dengan melaporkan kasus ini yang nantinya akan ditangani juga oleh jaksa.

Sementara itu, melalui fakta yang dihimpun wartawan pada berita kedua, ada makna yang tersirat bahwa tindakan jaksa agung yang berhasrat untuk menistakan lawan politiknya dengan menyatakan HT sebagai tersangka dalam kasus SMS merupakan langkah yang hanya buang-buang waktu dan sia-sia, karena pada akhirnya polisi menolak pernyataan tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, pihak berwajib menyatakan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Anak kalimat satu dengan lainnya dapat digabung sehingga membentuk sesuatu yang dapat dimaknai. Wartawan pada dasarnya membuat abstraksi bagaimana fakta-fakta yang saling terpisah dan tercerai-

berai digabungkan sehingga menjadi suatu kisah yang dapat dipahami oleh khalayak. Gabungan atau kombinasi ini akan membentuk koherensi lokal, yaitu pengertian yang didapat dari gabungan antarakalimat sehingga kalimat itu memiliki arti (Eriyanto, 2011).

Tabel 3. Rangkaian Antarkalimat

<b>18 Juni 2017</b>	Sebagai jaksa agung semestinya memahami asas praduga tidak bersalah sehingga menghormati proses hukum di kepolisian. Posisi jaksa agung membutuhkan figur penegak hukum yang netral dan juga profesional dalam penegakan hukum. Namun, yang terjadi justru jaksa agung saat ini diduga telah memainkan peran yang sangat kasar dengan pernyataan layaknya berita hoax.
<b>18 Juni 2017</b>	Meski tidak secara langsung menuliskannya di media sosial, namun konten yang disampaikan oleh yang bersangkutan mengandung unsur kebohongan dan pada akhirnya menjadi konsumsi publik. Artinya jaksa agung memberikan, mengupload isi yang bersifat bohong.
<b>19 Juni 2017</b>	Jaksa Agung M Prasetyo dinilai telah melampaui kewenangannya karena menyebut Ketua Umum Partai Perindo, HT sudah berstatus tersangka. Padahal, Bareskrim Polri menyatakan kasus laporan Jaksa Yulianto yang mengaku diancam lewat SMS oleh HT masih dalam tahap penyelidikan.
<b>19 Juni 2017</b>	Jelas sekali Jaksa Agung sedang berupaya membangun opini untuk mengintervensi proses hukum yang ditangani penyidik Polri. Sesama lembaga penegak hukum seharusnya saling menghargai dalam penanganan kasus. Apalagi, Bareskrim Polri belum menyatakan Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka dalam kasus tuduhan SMS tersebut.
<b>20 Juni 2017</b>	Realitas politik yang ada saat ini memang menjadikan SMS tersebut sebagai alasan penegak hukum mencari dan mengaitkannya dengan ancaman atau intimidasi. Padahal jika dirunut SMS ini tidak ada sama sekali, satu bagian kata pun yang membuat penegak hukum terancam.

Jika dilihat dari berbagai rangkaian antarkalimat yang dikombinasikan di atas, maka bisa ditemukan adanya kesamaan yaitu wacana penyanggahan dari pihak HT atas statemen jaksa agung. Wacana tersebut juga bisa dilihat dari kalimat yang menggunakan konjungsi antarklausa. Pemilihan kata “padahal” dan “namun” merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan pertentangan (Permita, 2019). Kalimat tersebut berusaha mengklarifikasi fakta-fakta yang telah beredar sebelumnya. Pada

pemilihan kata tersebut mengandung *ideasional mutafunction* proses relasional yang berusaha memaparkan definisi yang wartawan bentuk. Proses ini dilakukan agar para pembaca mulai membentuk *mindset* dengan definisi-definisi baru menurut wartawan (Kartikasari, 2020).

Tabel 4. Relasi

<b>Pemuda Perindo</b>	Dia melihat ada dua faktor utama lain pemanggilan ini, pertama sebagai aksi lanjutan pasca-kekalahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Faktor kedua, kasus ini untuk menutupi lemahnya kinerja jaksa, apalagi baru-baru ini dipermalukan kasus penangkapan jaksa di Bengkulu oleh KPK.
<b>Pengamat Hukum</b>	Menurut Suparji, meski baru seumur jagung kinerja partai berlambang burung rajawali itu terbilang signifikan dan patut diperhitungkan. Karir politik Hary Tanoe cukup merepotkan bagi para kompetitor. Sehingga langkah-langkah seperti menjegal Hary Tanoe giat dilakukan oleh sejumlah pihak.
<b>Komnas HAM</b>	Menurutnya, kasus ini semakin membingungkan setelah Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan HT telah menjadi tersangka. Maneger berharap, Yulianto jujur kepada Tuhan, dirinya sendiri, kepada hukum, dan masyarakat, apakah kasus ini murni hukum atau justru disebutnya berkaitan dengan politik.
<b>Gerindra</b>	Fery melihat kasus tersebut sebagai upaya dari pihak penguasa dalam menggunakan kekuasaannya di dalam tubuh Kejaksaan Agung. Selama ini, kata Fery, langkah dari jajaran Korps Adhyaksa itu dalam menelusuri suatu kasus yang ditangani terlihat sebagai pesanan.
<b>MAKI</b>	Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai pernyataan Jaksa Agung sebagai kekeliruan. Menurutnya Jaksa Agung tidak memiliki dasar mengucapkan hal tersebut. Oleh karena itu, kata dia, Jaksa Agung layak dicopot dari jabatannya.

Relasi, analisis ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana partisipan ditampilkan dalam teks. Terdapat tiga kategori partisipan utama menurut Fairclough, yaitu wartawan, khalayak, dan partisipan publik (Eriyanto, 2011). Dalam pemberitaan kasus sms HT pada *Sindonews.com*, partisipan publik yang dihadirkan antara lain politisi dan para ahli. Titik perhatian pada batasan relasi ini adalah bagaimana pola hubungan di antara partisipan publik tadi ditampilkan dalam teks (Ayatullah, 2014).

Pada pemberitaan pertama tabel di atas, Pemuda Perindo ditempatkan sebagai posisi yang menyerang jaksa agung; pemberitaan kedua, pengamat hukum ditampilkan sebagai posisi yang membela HT; pemberitaan ketiga, wartawan menempatkan Komnas HAM dalam posisi yang mempertanyakan keputusan jaksa agung; pemberitaan keempat dan kelima menempatkan Gerindra dan MAKI sebagai posisi yang menekan jaksa agung. Pola relasi yang dibangun dalam teks berita kasus tersebut menempatkan Hary Tanoe sebagai pihak yang diuntungkan, dan khalayak ditempatkan untuk mendukung setiap wacana yang dibentuk media melalui teks.

Identitas, Analisis ini mengacu pada posisi dan keberpihakan wartawan dalam menampilkan berita (Kartikasari, 2020). Dalam pemberitaan kasus pesan singkat HT, keberpihakan *Sindonews.com* ditunjukkan melalui pendapat dalam berita yang didominasi oleh pihak tertentu dan menjadi wacana yang dominan, sementara suara atau pendapat dari pihak lainnya tidak ditampilkan. Dalam hal ini terlihat ketidaksetaraan, *Sindonews.com* lebih menempatkan diri pada pihak HT karena teks-teks yang dikonstruksi lebih memenangkan sosok tersebut. Penggambaran sosok HT seringkali ditempatkan dominan dan mendapatkan pembelaan dalam teks, di sisi lain pihak jaksa agung kerap disudutkan dalam teks berita.

### **3.2. Strategi Konstruksi Wacana Kasus SMS Ancaman HT**

Alat kedua yang digunakan Fairclough yaitu analisis praktik wacana (mesostruktural), di mana interpretasi dilakukan terhadap pemrosesan wacana seperti penggunaan wacana dan cara pekerja media dalam memproduksi teks berita (Weiwei & Weihua, 2015). Pada dimensi kedua Fairclough ini, peneliti akan menganalisis wacana melalui intertekstualitas untuk memberikan wawasan dalam membedah wacana yang menjadi fondasi *Sindonews.com* dalam merepresentasikan kasus SMS Hary Tanoe tahun 2017.

Tahapan ini berfokus pada produksi wacana berita yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara praktik diskursif dan teks (Wang, 2021). Menurut Fairclough (2004), intertekstualitas dapat dilihat dalam

bentuk klaim dari penulis atau reporter, bahwa apa yang ditulis benar-benar telah dikatakan, bahwa apa yang dikatakan narasumber benar-benar bisa dipercaya.

Reporter cenderung membenarkan pendapat mereka dengan hanya mengutip kata-kata dari orang lain. Mereka dapat menandai dengan jelas suara orang (narasumber) yang wacananya mewakili pendapat mereka dengan menggunakan tanda kutip dan kata kerja liputan. Pilihan yang dibuat oleh seorang reporter atau jurnalis tidak terjadi secara acak, akan tetapi diinvestasikan secara ideologis (Chen, 2016). Analisis pada tahapan ini dapat diwujudkan dengan menelaah reportase ujaran melalui sumber berita.

Menurut Xin Bin (dalam Yuhan, 2021) sumber berita atau narasumber dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain: narasumber spesifik, memberikan informasi rinci tentang narasumber seperti nama lengkap, profesi, status sosial, dan lainnya; narasumber semi-spesifik, memberikan pengenalan umum atau samar-samar tentang narasumber; serta narasumber tidak spesifik, reporter dengan sengaja menyembunyikan atau bahkan tidak mengetahui narasumber. Pilihan sumber berita atau narasumber dapat menjelaskan posisi reporter (Wang, 2021).

Berikut merupakan contoh narasumber spesifik dan semi-spesifik yang peneliti temukan:

- 1) Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai pernyataan Jaksa Agung sebagai kekeliruan. "Jaksa Agung *offside*," kata Boyamin.
- 2) Independensi Jaksa Agung HM Prasetyo digugat banyak pihak. Latar belakang sebagai kader Partai Nasdem diduga kuat membuat sejumlah keputusannya diduga kental bernuansa politis sehingga menguntungkan partai asalnya.
- 3) Tidak etis Jaksa Agung mengambil peran kepolisian dengan menyatakan status HT sebagai tersangka yang sudah pasti tidak benar. Apalagi, kepolisian sudah membantah pernyataan Jaksa Agung tersebut.

Pada kutipan (1) terdapat narasumber spesifik, di mana di dalamnya disebutkan nama lengkap beserta profesinya. Informasi yang disampaikan narasumber spesifik bertujuan untuk membuat laporan berita menjadi lebih kredibel dan meyakinkan khalayak (Wang, 2021). Melalui pernyataan yang disampaikan Boyamin Saiman, reporter ingin meyakinkan bahwa apa yang dilakukan jaksa agung terhadap HT merupakan sebuah kekeliruan.

Sementara itu, pada kutipan (3) terdapat narasumber semi-spesifik. Frasa “banyak pihak” memberikan kesan kepada pembaca bahwa cakupannya sangat luas. Melalui hal ini, reporter ingin menekankan bahwa sikap jaksa agung tidak bisa dianggap sepele karena mendapatkan gugatan dari banyak pihak, oleh sebab itu harus diberikan ganjaran secara hukum.

Begitu pula dengan kutipan (4) merupakan narasumber semi-spesifik. Diksi “kepolisian”, meskipun tidak disebutkan nama narasumber secara spesifik, namun organisasi maupun institusi itu sendiri sudah cukup jelas untuk mewakili argumen yang ingin ditekankan reporter. Organisasi atau institusi sangat penting bagi pembaca untuk memberikan kesan bahwa suatu laporan berita benar-benar kredibel (Weiwei & Weihua, 2015).

Pemilihan sumber berita atau narasumber di atas merupakan strategi reporter *Sindonews.com* dalam merepresentasikan kasus SMS HT, dengan tujuan mendapatkan kepercayaan dari publik bahwa pihak yang seharusnya dipermasalahkan dalam kasus ini bukanlah HT, melainkan jaksa agung dan para pihak yang mendukungnya.

### **3.3. Praktik Sosiokultural Berita Kasus SMS Ancaman HT**

Teks berita kasus SMS Ancaman Hary Tanoë tidak muncul begitu saja, melainkan dibangun oleh wacana yang juga tidak lepas dari hubungan-hubungan sosial, relasi sosial, dan institusi sosial. Konteks sosial yang ada di luar media sesungguhnya memengaruhi bagaimana sebuah wacana ada dalam media (Ayatullah, 2014).

Analisis ini dibagi menjadi tiga level, antara lain: level situasional, berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya; level institusional,

berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal ataupun eksternal; dan level sosial, berkaitan dengan situasi yang lebih makro (Kartikasari, 2020).

### 3.3.1 Level Situasional

Berita tentang kasus SMS Hary Tanoesoedibyo untuk pertama kali dimuat kembali oleh *Sindonews.com* pada Jumat, 16 Juni 2017 pukul 22.23 WIB. Setelah 1,5 tahun kasus tersebut diam, pada pertengahan tahun 2017 muncul kembali ke permukaan.

Kasus ini muncul pertama kali pada Januari 2016, berawal dari penanganan kasus Mobile 8 oleh Jaksa Yulianto. Di dalam laporan kasus tersebut terdapat nama HT sebagai terlapor. Setelah laporan diadakan ke Bareskrim Polri, Jaksa Yulianto mengaku mendapatkan SMS bernada ancaman sebanyak tiga kali dari HT, sehingga melaporkan tindakan tersebut ke Mabes Polri.

Lama kasus itu surut, 1,5 tahun kemudian muncul kembali setelah HT mendapatkan panggilan pemeriksaan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kasus tersebut menjadi semakin keruh saat Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan status HT sebagai tersangka pada 16 Juni 2017.

Kemudian, berita demi berita hadir di *Sindonews.com* sebagai netralisir dari pihak Hary Tanoe atas kembali mencuatnya kasus tersebut dengan memberikan pernyataan bahwa tidak ada unsur ancaman dari SMS tersebut, melainkan hanya menyampaikan misi politik. Ini dilakukan untuk mentransmisikan pesan politik guna membangun maupun mempertahankan citra kepemimpinan HT, sehingga menimbulkan simpati dari masyarakat. Apalagi, di tahun itu popularitas HT sebagai pemimpin parpol cukup tinggi. *Sindonews.com* dalam hal ini menjadi media yang difungsikan sebagai sarana agenda politik seseorang dalam meningkatkan kekuasaannya serta memperkuat posisinya dalam dunia politik (Rahman et al., 2018).

Saat itu, berita yang berkembang di masyarakat adalah telah ditetapkannya HT sebagai tersangka berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan Polri pada 15 Juni 2017.

Pemimpin Partai Perindo itu disangkakan dengan pasal 29 juncto Pasal 45 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

### 3.3.2 Level Institusional

*Sindonews.com* merupakan salah satu media yang tergabung ke dalam MNC Group di mana Hary Tanoesoedibyo berperan sebagai komisaris utamanya. Sebagai pemeran utama dalam kerajaan media terbesar se-Asia Tenggara itu, HT tentu memiliki andil dalam penanaman modal di dalamnya.

Tidak cukup membangun bisnis media, HT juga melebarkan sayap di ranah politik. Setelah sebelumnya bergabung dengan Hanura dan Nasdem, pada 2015 ia akhirnya mendirikan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Langkahnya dalam berpolitik tidak berjalan dengan sendirinya. HT menjadikan MNC Group sebagai kendaraan untuk mengantarkannya dalam memperoleh perhatian publik.

Dalam studinya, Khamim & Sabri (2019) menemukan adanya upaya dari HT dalam menggunakan personalisasi politik untuk membangun hubungan dengan calon pemilih. Para pejabat di internal perusahaan MNC Group dijadikan penggerak utama di kantor pusat hingga kantor cabang Perindo. Sebanyak 14 pejabat MNC Group menjadi bagian dari 33 orang yang menjadi pengurus dewan pimpinan pusat partai berlambangkan burung garuda itu.

Dengan melihat adanya fakta ini, keberpihakan media menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Dalam setiap pemberitaan bernuansa politik, media-media MNC Group bertendensi pada HT sebagai Ketua Umum Perindo sekaligus pemilik dari perusahaan itu sendiri. Ketika elite politik berafiliasi dengan media, media itu menjadi menunjukkan tendensi dan dukungan politiknya pada pemilik (Bahrudin dalam Khamim & Sabri, 2019).

Sebagai partai baru, Perindo mampu membuktikan kekuatannya terutama dalam pergerakan menuju pemilu 2019. Ini dibuktikan dengan didaftarkannya partai tersebut sebagai calon peserta pemilu periode mendatang. Popularitas dan elektabilitasnya pun semakin lama semakin

menanjak. Pada akhir 2016, Lembaga Survei Sinergi Data Indonesia (SDI) menyebutkan bahwa HT menduduki peringkat 3 besar dalam survei elektabilitas capres pada pemilu 2019 dengan presentase 6,50 persen (Astyawan, 2016). Ini menandakan bahwa HT dan Partai Perindo memiliki kans besar di pemilu 2019.

Dari fenomena ini, peneliti menemukan pembacaan dari *Sindonews.com* mengenai sikap jaksa agung sebagai manuver politik untuk menjegal langkah HT menuju pilpres 2019. Apalagi, posisi Perindo saat itu adalah sebagai oposisi dari kubu Jokowi, dan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 partai tersebut turut andil dalam kemenangan pasangan Anis-Sandi. *Sindonews.com* melihat bahwa hal ini membuat kubu oposisi menjadi terancam sehingga melatarbelakangi jaksa agung melayangkan tuntutan kepada HT dalam kasus SMS yang ditujukan kepada Jaksa Yulianto.

Dalam analisisnya, Kunandar (2017) banyak menemukan kata “dizalimi” dalam berita yang memuat kasus ini pada media-media yang tergabung ke dalam MNC Group. Kata tersebut diartikan sebagai adanya pihak yang melakukan perbuatan dengan tujuan merugikan HT. Pihak tersebut adalah jaksa agung yang mewakili pemerintahan Jokowi. Kunandar (2017) juga melihat, tidak lama setelah kasus ini ramai diperbincangkan, tiba-tiba saja surut dan tidak pernah dibesar-besarkan lagi begitu HT mengumumkan bahwa partainya akan mendukung Jokowi pada pilpres mendatang. Setelah itu, kasus Mobile 8 yang menyeret nama HT dan kasus SMS ancaman yang menjadikannya sebagai tersangka juga tidak pernah terdengar lagi.

### 3.3.3 Level Sosial

Pada level ini, Fairclough (2004) mengatakan bahwa wacana yang muncul berangkat dari perubahan yang timbul di masyarakat. Sepekan semenjak berita mengenai kasus SMS HT kembali beredar di masyarakat, saham tiga perusahaan dari MNC Group mengalami penurunan. Berdasarkan situs *bareksa.com*, tiga perusahaan tersebut antara lain: PT Media Nusantara Tbk (MNCN) turun sahamnya sebesar 1,32 persen; PT Global Mediacom Tbk

(BMTR) turun hingga 1,6 persen; dan PT MNC Land Tbk (KPIG) turun sebesar 5,8 persen.

Menyikapi hal demikian, *Sindonews.com* menghadirkan berita-berita yang bertujuan untuk mengklarifikasi dari kabar yang telah beredar di masyarakat. Berita-berita yang diterbitkan lebih menekankan bahwa status HT bukan tersangka, melainkan saksi, bahwa kasus ini masih menjadi penyelidikan oleh Bareskrim Mabes Polri. *Sindonews.com* juga cenderung menekankan citra positif pemimpin Partai Perindo itu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.

*Sindonews.com* dalam kasus ini menjadi juru bicara serta menjadi corong untuk menuangkan ideologi kepada khalayak bahwa sikap jaksa agung dalam menuntut HT merupakan sebuah kekeliruan lantaran telah melakukan *abuse of power*; bahwa SMS yang dilayangkan bos MNC Group itu kepada Jaksa Yulianto bukan sebuah ancaman, melainkan bukti dari kepeduliannya terhadap nasib bangsa Indonesia di masa depan.

Hegemoni ideologi tersebut dilakukan untuk mengumpulkan semangat khalayak, menggerakkan wacana perubahan, dan memobilisasi masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu tujuan politik. Dengan kekuasaan yang dimiliki, media massa menjadi sarana untuk menggiring perhatian khalayak agar memperhatikan isu-isu tertentu sesuai kepentingan politik dari pemiliknya (Kurniasari & Aji, 2015).

Hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berita sebagai produk praktik sosial, meskipun diklaim sebagai wacana yang objektif dan adil, mau tidak mau dipengaruhi oleh ideologi. Ideologi tersebut dikukuhkan melalui penggunaan bahasa sebagai *tools*. Sebagaimana yang terjadi pada media *Sindonews.com*, di mana pemiliknya merupakan seorang tokoh politik, berita-berita yang disiarkan pun sarat akan kepentingan politik. Dalam pemberitaan kasus dugaan SMS ancaman Hary Tanoe, bahasa yang digunakan cenderung membela HT dan menyudutkan jaksa agung selaku pelapor. Ideologi ini juga bisa diketahui dari cara pekerja media dalam memproduksi teks untuk melihat bagaimana *Sindonews.com*

merepresentasikan kasus tersebut. Dalam hal ini, *Sindonews.com* bekerja layaknya media humas bagi HT, dengan mewacanakan “tersangkanya bukan HT, melainkan jaksa agung dan para pendukungnya”, untuk mendapatkan kepercayaan kembali dan simpati dari publik. Wacana itu tidak lepas dari relasi dan institusi sosial, di mana konteks sosial yang ada di luar *Sindonews.com* mempengaruhi bagaimana wacana dapat terbangun dalam media tersebut.

#### 4. PENUTUP

Dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kategori analisis wacana dalam pemberitaan kasus SMS ancaman Hary Tanoe (HT) tahun 2017 yang dilakukan *Sindonews.com*, yaitu konstruksi wacana kasus SMS ancaman HT, strategi konstruksi wacana kasus SMS ancaman HT, dan praktik sosiokultural berita kasus SMS ancaman HT.

Pada kategori *pertama*, terlihat ketidaksetaraan *Sindonews.com* dengan lebih menempatkan diri pada pihak HT karena teks-teks yang dikonstruksi lebih memenangkan sosok tersebut. Penggambaran sosok HT sering ditempatkan dominan dan mendapatkan pembelaan dalam teks, sementara pihak jaksa agung kerap disudutkan. Pada kategori *kedua*, reporter *Sindonews.com* menggunakan strategi melalui pemilihan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan publik mengenai tidak bersalahnya HT dalam kasus ini. Pada kategori *ketiga*, melalui level situasional, institusional, dan sosial menunjukkan bahwa pemberitaan pada *Sindonews.com* hadir sebagai netralisir dari kabar yang sedang berkembang, juga menjadi juru bicara HT. Selain itu, keberpihakan media ini kepada HT juga tidak bisa dihindari karena adanya afiliasi politik antara *Sindonews.com* dengan bos dari MNC Group itu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penelitian selanjutnya. Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam studi ini, yaitu tidak terdapatnya proses konsumsi dalam analisis pada dimensi kedua. Untuk itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan metode berupa

wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk menggali informasi yang lebih dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelwahab, D., & Abdelwahab, M. (2021). El-Sisi's Speech on the 47th Anniversary of the October Victory: A Critical Discourse Analysis. *Arab World English Journal*, 12(3), 159–173.
- Afrianto, D. (2017). *MNC Jadi Perusahaan Terbesar di Indonesia*. Okezone.Com.  
<https://economy.okezone.com/read/2017/03/06/278/1635813/mnc-jadi-perusahaan-media-terbesar-di-indonesia>
- Astuti, Y. D. (2016). Media dan Gender (Studi Deskriptif Representasi Stereotipe Perempuan dalam Iklan di Televisi Swasta. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 25–32.
- Astyawan, P. R. (2016). *Hary Tanoe Masuk Tiga Besar Elektabilitas Capres 2019*. Okenews.  
<https://nasional.okezone.com/read/2016/11/05/337/1533968/hary-tanoe-masuk-tiga-besar-elektabilitas-capres-2019>
- Ayatullah, A. L. (2014). Korupsi dalam Wacana Pers Lokal (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap Teks Berita Kasus Hambalang Tahun 2013 pada Surat Kabar Malang Post. *Journal Badati*, 1–16.
- Chen, Y. (2016). A Critical Discourse Analysis of News Reports on Sino-Japan Boat Collision. *International Conference on Education & Educational Research and Environmental Studies*, 135–139.
- Cheng, H.-I. (2016). In Migrant Workers' Social in Taiwan: A Critical Analysis of Mainstream News Discourse. *International Journal of Communication*, 10, 2509–2528.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Media*. Pustaka Pelajar.
- Fairclough, N. (2004). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. Routledge.
- Foucault, M. (1969). *The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language*. Pantheon Books.
- Haryatmoko, D. (2017). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*. Rajawali Pers.
- Kalla, H. (2019). *A Changing Climate: How Climate is Communicated in Swedish and North American News Media*. Umea Universitet.
- Kartikasari, S. (2020). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap Pemberitaan Jokowi Naikkan Iuran BPJS di Tengah Pandemi. *Jurnal An-Nida*, 12(2), 114–124.

- Khak, A. M. (2015). Verba Kekuasaan SBY dalam Surat Kabar Berbahasa Indonesia. *Jurnal Badan Bahasa*, 11(1), 44–54.
- Khamim, A. B. M., & Sabri, M. F. (2019). Konglomerasi Media dan Partai Politik: Membaca Relasi MNC Group dengan Partai Perindo. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 112–136.
- McQuail, D. (2011). *Toeri Komunikasi Massa*. Salemba Humanika.
- Pahlevi, A. F. (2018). Hegemoni Harian Fajar Menjelang Pilpres 2019. *Jurnal Al-Khitabah*, 5(2), 142–157.
- Permita, M. R. (2019). Bencana Lumpur Lapindo: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal Ilmiah Kebahasaan*, 15(2), 190–202.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Kelompok Intrans Publishing.
- Saraswati, A., & Sartini, N. W. (2017). Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Mozaik Humaniora*, 17(2), 181–191.
- Shabrina, I. (2016). *Persuasive Strategies Used in Hillary Clinton's Political Campaign Speech*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sudibyo, A. (2000). Absennya Kajian Ekonomi Politik Media di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 115–134.
- Tian, X. (2018). Critical Discourse Analysis of News Reports: Based on the Guardian News Report of China's Military Parade to Mark the 70 Years of Second World War. *Theory and Practice in Language Studies*, 8(4), 433–444.
- Tyas, S. N. (2010). *Konglomerasi Industri Media Penyiaran di Indonesia Analisis Ekonomi Politik pada Group Media Nusantara Citra*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ullah, S. F., Khan, I. U., & Khan, A. K. (2021). Power and Gender Issues in Sidhwa's The Pakistani Bride: A Critical Discourse Analysis. *Sir Syed Journal of Education & Social Research*, 4(1), 240–246.
- Wang, Y. (2021). A Critical Discourse Analysis of News Reports on Covid-19 in People's Daily and The New York Times. *Jurnal IPTEK-KOM*, 23(1), 49–62.
- Weiwei, W., & Weihua, L. (2015). Critical Discourse Analysis of News Reports on China's Bullet-Train Crash. *CSCanada*, 10(2), 1–8.
- Wirawanda, Y. (2018). Fanatisme Fans Sepakbola Terkait Flaming dan Netiquette. *Komuniti*, 10(2), 123–132.
- Yuhan, G. (2021). Corpus-based Critical Discourse Analysis of "Belt and Road" Initiative in Domestic and Foreign Mainstream Media News Report. *Proceedings of the 2nd International Conference on Language, Art, Dan Cultural Exchange*, 558–566.